

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Komunikasi pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) khususnya wilayah Jawa Barat menghadapi realitas sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang berimplikasi pada tingginya risiko konflik siber. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat berperan besar dalam menyebarkan informasi publik, mengedukasi masyarakat, dan memajukan literasi digital dan komunikasi publik. Diskominfo tidak hanya sekedar penyedia informasi tetapi juga agen perubahan sosial dalam membangun masyarakat yang informatif, kritis, dan beradab. sosialisasi yang dilakukan baik melalui media konvensional maupun digital, mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat identitas keindonesiaan yang berpijak pada nilai-nilai yang patuh pada aturan, transparansi, religius, kebersamaan, hingga toleransi¹.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan konsep strategi komunikasi pemerintah dengan nilai madani sebagai kerangka analisis utama. Data menunjukkan bahwa di era digital, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap "perang siber" sosial, seperti

¹ Hafied Cangara, *Perencanaan Strategi Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

penyebaran hoaks dan ujaran kebencian². Meskipun indeks literasi digital Jawa Barat terus menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 berdasarkan Jabar Saber Hoaks dan tantangan berupa fenomena *echo chamber* dan *post-truth* masih menjadi hambatan utama dalam memastikan pesan pemerintah diterima secara objektif oleh masyarakat.³ Guna merespons hal ini, Diskominfo Jabar mengadopsi strategi "*from zero to hero*", yakni transparansi penuh dalam menangani isu sensitif seperti pengelolaan sampah dan stunting melalui konten media sosial yang interaktif dan humanis⁴. Selain itu, salah satu bentuk nyata sosialisasi nilai madani di Jawa Barat adalah program PP Tunas yang mengatur pembatasan media sosial bagi anak guna menumbuhkan karakter generasi muda yang toleran dan intelektual.

Di sisi lain, Jabatan Penerangan (Jabatan Penerangan) Kedah di Malaysia mengemban tugas krusial untuk menyosialisasikan visi Malaysia Madani di tengah masyarakat yang heterogen. Sebagai lembaga di bawah Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Kedah tidak hanya mengandalkan saluran digital, tetapi secara intensif melakukan pendekatan

² Ika Mardiah, *Antisipasi Perang Siber di Media Sosial, Diskominfo Jabar ... Antisipasi Perang Siber di Media Sosial, Diskominfo Jabar Perkuat Literasi Digital*. (2024)
<https://bappeda.jabarprov.go.id/antisipasi-perang-siber-di-media-sosial-diskominfo-jabar-perkuat-literasi-digital/>

³ Jabar Saber Hoaks. Strategi komunikasi Publik Tangkal Hoaks di Jawa Barat. (2025)
<https://saberhoaks.jabarprov.go.id/v2/artikel/detail/df8395cd5df21beece5e389a33b186c1/STRATEGI-KOMUNIKASI-PUBLIK-TANGKAL-HOAKS-DI-JAWA-BARAT>

⁴ Zharfan, S. Z., Rudiana, & Centia, S. (2024). *Perencanaan Komunikasi Pemerintahan dalam Pengelolaan Konten Media Sosial untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar*. *Jurnal Responsive*, 7(4), 240-253

"turun padang" melalui program-program seperti *Info On Wheels* (IOW) untuk menjangkau masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi digital⁵ Namun, efektivitas sosialisasi ini sering kali terbentur pada rendahnya literasi digital di kalangan kelompok umur tertentu di pedesaan, yang menyebabkan konsep-konsep kompleks dalam kerangka kerja Madani sulit dipahami secara utuh oleh masyarakat. Strategi komunikasi pemerintah melalui instansi seperti Jabatan Penerangan Kedah di Malaysia yang merupakan adalah salah satu lembaga pemerintah mempunyai pendekatan strategis dalam menyebarkan informasi, mendidik masyarakat, serta membentuk opini publik yang positif terhadap kebijakan negara. Lembaga ini berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat melalui berbagai program komunikasi, seperti Sosialisasi penerangan, media penyiaran, dan pendekatan komunitas.

Dalam sosialisasi nilai masyarakat madani, Jabatan Penerangan Kedah memanfaatkan berbagai media dan kegiatan partisipatif seperti ceramah, pameran, dan dialog masyarakat untuk memperkuat pemahaman publik terhadap pentingnya kehidupan yang berasaskan nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kebersamaan. Salah satu programnya adalah Pentarama ke sekolah sekolah khususnya di negeri Kedah Malaysia dengan tujuan menciptakan generasi muda yang berkarakter dan cinta negara serta literasi digital.

⁵ Mahbob, M. H., et al. (2019). *The Influence of Strategic Communication on the Effectiveness of Message Delivery*. Malaysian Journal of Communication.

Kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yakni membentuk masyarakat madani yang berperadaban, strategi komunikasi yang digunakan sangat dipengaruhi oleh struktur politik, budaya birokrasi, dan karakteristik sosial masyarakat masing-masing negara. Malaysia, misalnya, lebih menekankan pendekatan komunikasi yang terpusat (*top-down*) dengan kontrol narasi yang kuat dari pemerintah pusat, sedangkan Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang lebih partisipatif dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media lokal. Perbedaan pendekatan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam efektivitas sosialisasi nilai madani di tengah perubahan pola komunikasi masyarakat digital.

Meskipun berbagai studi telah membahas strategi komunikasi pemerintah dalam sosialisasi kebijakan,⁶ masih ada keterbatasan dalam menganalisis bagaimana strategi komunikasi dapat disesuaikan dengan audiens yang memiliki tingkat keterhubungan informasi yang berbeda. Dalam konteks penyebaran informasi dengan pemanfaatan media oleh dua negara yakni Jabatan Penerangan di Kedah Malaysia dan Dinas Komunikasi dan Informatika di Jawa Barat Indonesia memahami strategi komunikasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi program

⁶ Lidiia Shvelidze, Tetiana Karavaieva, and Yuliia Tomchakovska, "Pakistan Journal of Life and Social Sciences: How Communication Strategies Influence Conflict Development: A Case Study of Social Networks," *Pak. j. Life Soc. Sci* 22, no. 2 (2024): 4257–68, doi:10.57239/PJLSS-2024-22.2.00314.

dapat diterima oleh masyarakat luas, termasuk kelompok yang kurang terpapar informasi.

Kedua instansi ini mencerminkan bahwa strategi komunikasi publik bukan sekadar penyebaran informasi, melainkan upaya mitigasi terhadap resistensi dan disinformasi yang tumbuh dari karakteristik unik masyarakat di wilayah masing-masing⁷. Permasalahan yang dialami oleh Diskominfo Jabar dan Jabatan Penerangan Kedah bukanlah fenomena isolasi. Hal ini merupakan representasi dari dinamika sosial-politik yang lebih luas di Indonesia dan Malaysia, yang merefleksikan tantangan komunikasi pemerintah dalam menyampaikan nilai-nilai secara efektif. Di Indonesia dan Malaysia, masih ditemukan kesenjangan antara pesan yang disampaikan pemerintah dengan tingkat pemahaman serta partisipasi masyarakat. Kurangnya strategi komunikasi yang tepat dapat menyebabkan rendahnya keterlibatan publik, penyebaran informasi yang tidak merata, serta munculnya ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi ini semakin kompleks di era digital, di mana masyarakat tidak lagi menjadi penerima pasif, melainkan aktif dalam menafsirkan dan merespons informasi, termasuk di tengah maraknya disinformasi dan keterbatasan literasi digital pada kelompok tertentu.⁸

⁷ Guan, Y., et al. (2020). *Understanding the Impact of the COVID-19 Pandemic on Career Development: Insights from Cultural Psychology*

⁸ Debi Mayanti Agus, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Model Kota Madani" (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2018).

Secara konseptual, komunikasi pemerintah modern tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai strategi sosial-politik yang menentukan keberhasilan internalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai madani sendiri mencerminkan prinsip kemanusiaan, keadilan, partisipasi, dan keterbukaan yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang beradab. Nilai madani secara konseptual mengandung gagasan tentang tatanan sosial yang beradab, di mana manusia dipandang sebagai subjek pembangunan yang berperan aktif, patuh aturan, serta menjunjung tinggi moralitas, toleransi, dan solidaritas. Nilai-nilai tersebut tidak hanya penting untuk membangun kohesi sosial, tetapi juga menjadi pilar utama bagi terbentuknya transparansi, akuntabel, dan bersih kelola pemerintahan.

Akibat modernisasi dan globalisasi, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia, menghadapi tantangan serupa dalam menanamkan nilai-nilai madani di tengah arus perubahan sosial, teknologi digital, dan pluralitas masyarakat yang semakin kompleks.⁹ Dalam hal ini, sosialisasi nilai madani menjadi salah satu instrumen penting bagi kedua negara untuk memperkuat identitas nasional sekaligus membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya kehidupan sosial yang harmonis dan demokratis. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah di kedua

⁹ Rahman Aulia and Diah Fatma Sjoraida, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Subang Mensosialisasikan Gerakan Pembangunan Untuk Infrastruktur Berkelanjutan," *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (2017).

negara adalah bagaimana strategi komunikasi yang digunakan mampu menyentuh masyarakat lintas generasi dan lapisan sosial, terutama di era digital yang sarat dengan disinformasi dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka, keberhasilan sosialisasi program pemerintah tidak hanya diukur dari luasnya penyebaran informasi, tetapi juga dari kemampuan strategi komunikasi dalam membangun pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat.¹⁰

Penggunaan strategi komunikasi tidak tepat dapat menimbulkan beberapa masalah potensial, seperti pesan komunikasi yang tidak dipahami atau diabaikan oleh masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah baik dalam pemerintahan lokal Malaysia dan Indonesia, serta penyebaran informasi melalui saluran media yang tidak konsisten, yang dapat mengurangi efektivitas dan kepercayaan terhadap pemerintah serta program pemerintah itu sendiri. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya strategi komunikasi dalam mendukung kesuksesan sosialisasi program pemerintah.¹¹ Tanpa rencana komunikasi yang tepat, pesan program pemerintah tidak akan dapat

¹⁰ Debi Mayanti Agus, "Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mewujudkan Model Kota Madani" (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, 2018).

¹¹ M. H Mahbob, W. I Wan Sulaiman, and W. A Wan Mahmud, "Pengaruh Komunikasi Strategik Ke Atas Keberkesanan Penyampaian Mesej (the Influence of Strategic Communication on the Effectiveness of Message Delivery)," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 35, no. 3 (2019): 246–262.

menjangkau segmen yang diinginkan, sehingga mengurangi dampak keseluruhan program pemerintah.¹²

Pendekatan komunikasi pemerintah semacam ini seringkali gagal menjangkau audiens targetnya, terutama di daerah pedesaan atau di kalangan mereka yang memiliki akses terbatas terhadap media digital. Terutama di komunitas pedesaan, hal ini cenderung menyebabkan pemahaman publik yang rendah terhadap konsep Sosialisasi dan implementasi program yang dirancang dalam kerangka kerja tersebut. Salah satu hambatan adalah kurangnya aksesibilitas terhadap informasi tentang materi sosialisasi program pemerintah, yang merupakan faktor utama.¹³

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan nasional, karena tanpa pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, pesan dari sosialisasi program pemerintah sulit diterima dan dipahami oleh masyarakat di daerah terpencil. Komunikasi yang tepat dapat memberikan wawasan komprehensif untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam Sosialisasi pemerintah.

¹² M. H Mahbob et al., “Komunikasi Strategik Dan Peranannya Untuk Mewujudkan Komunikasi Berkesan Dalam Organisasi (Strategic Communication and Its Role to Create an Effective Communication in Organization),” *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 35, no. 2 (2019): 49–67.

¹³ Yanjun Guan, Hong Deng, and Xinyi Zhou, “Understanding the Impact of the COVID-19 Pandemic on Career Development: Insights from Cultural Psychology,” *Journal of Vocational Behavior* 119, no. May (2020): 1–5, doi:10.1016/j.jvb.2020.103438.

Dengan demikian, penelitian ini termotivasi untuk menghadirkan analisis yang dapat memberikan rekomendasi praktis, baik bagi Jabatan Penerangan Kedah maupun Diskominfo Jawa Barat, agar strategi komunikasi mereka lebih inklusif, adaptif, dan efektif dalam memperkuat legitimasi serta partisipasi masyarakat¹⁴. Memahami mengapa strategi komunikasi tertentu berhasil atau gagal di wilayah kita juga sangat penting. Tinjauan ini dapat membantu mengidentifikasi bagaimana pesan harus dirumuskan agar sesuai dengan konteks lokal yang dibangun serta saluran media dan komunikasi yang paling sesuai untuk digunakan serta bagaimana evaluasi dari hasil sosialisasi dilakukan. Masalah-masalah ini harus diperbaiki, atau karena sosialisasi program pemerintah di dua negara, Indonesia dan Malaysia berisiko kehilangan momentum dan gagal mencapai tujuannya. Masyarakat mungkin tetap tidak sadar atau tidak tertarik pada prinsip-prinsip dasar yang ingin disampaikan. Selain itu, pendekatan komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesenjangan informasi dan memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.¹⁵

Strategi komunikasi pemerintah tidak hanya soal menyebarkan informasi, tetapi juga bagaimana pesan tersebut mampu dipahami, diterima, dan menggerakkan partisipasi masyarakat yang hidup dalam keragaman budaya, sosial, dan agama. Dalam konteks Malaysia, peneliti terdorong

¹⁴ Muarifah et al., "Mengatasi Resistensi Terhadap Perubahan Dalam Wawasan, Intervensi Dan Strategi Untuk Adaptasi Organisasi," *Economic and Business Management International Journal* 4, no. 1 (2024): 169–77.

¹⁵ Sukardi, "Islam Dan Civil Society."

untuk mengkaji lebih dalam strategi komunikasi kunci yang digunakan Jabatan Penerangan dalam Sosialisasi Malaysia Madani mulai dari perancangan pesan, pemilihan media, hingga evaluasi efektivitasnya di tengah masyarakat multikultural. Hal ini penting, sebab meskipun tingkat persetujuan masyarakat terhadap Malaysia Madani cukup tinggi. Sementara itu, pada sisi Indonesia, motivasi penelitian diarahkan pada bagaimana Diskominfo Jawa Barat memanfaatkan media digital dalam Sosialisasi pemerintahnya untuk menjawab tantangan kesenjangan literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta derasnya arus disinformasi. Peneliti ingin menggali sejauh mana strategi komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran publik, menjalin kedekatan dengan masyarakat heterogen, dan merespons isu-isu lokal secara kontekstual.¹⁶

Kedua instansi ini menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi program pemerintah sangat bergantung pada pemilihan strategi komunikasi yang tepat sasaran dan kontekstual. Jabatan Penerangan Kedah mengedepankan pendekatan kultural dan nilai kebangsaan melalui interaksi langsung, sementara Diskominfo Jawa Barat memanfaatkan kekuatan media digital dan kolaborasi lintas sektor. Kombinasi pendekatan ini mencerminkan pentingnya integrasi antara komunikasi emosional dan rasional dalam membangun pemahaman serta penerimaan masyarakat

¹⁶ Maknun et al., "Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, Dan Kontestasi Di Ruang Digital."

terhadap kebijakan publik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah kini bergerak ke arah digitalisasi, namun dengan tantangan baru berupa kebutuhan akan literasi digital, penanggulangan hoaks, dan penguatan nilai moral dalam ruang virtual¹⁷.

Dalam kerangka yang lebih luas, penelitian ini juga sejalan dengan agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya institusi yang kuat, transparan, dan inklusif (Tujuan 16). Sosialisasi masyarakat madani pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan penguatan etika sosial. Komunikasi yang efektif dalam hal ini menjadi kunci utama agar nilai-nilai tersebut tidak hanya berhenti pada level wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perilaku dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, latar belakang Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam sosialisasi madani bukan hanya persoalan teknis penyebaran informasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya kehidupan beradab, berkeadilan, dan partisipatif. Perbandingan antara dua lembaga Jabatan Penerangan Kedah di Malaysia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat di Indonesia akan memberikan gambaran yang

¹⁷ Adelia Cahyani Masrifah, "Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Surabaya Melalui Media Sosial. Ilmu Komunikasi" (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

komprehensif tentang bagaimana dua negara serumpun ini membangun masyarakat madani melalui komunikasi publik. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, khususnya dalam komunikasi pemerintahan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan strategi komunikasi berbasis nilai dalam global yang semakin digital dan multikultural.

B. Rumusan Masalah

Dari Ada beberapa rumusan masalah latar belakang yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengembangan pesan komunikasi yang diterapkan oleh Jabatan Penerangan Kedah Malaysia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Indonesia dalam mensosialisasikan nilai madani kepada masyarakat?
2. Bagaimana pemilihan media yang diterapkan oleh Jabatan Penerangan Kedah Malaysia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Indonesia dalam mensosialisasikan nilai madani kepada masyarakat?
3. Bagaimana evaluasi strategi yang diterapkan oleh Jabatan Penerangan Kedah Malaysia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Indonesia dalam mensosialisasikan nilai madani kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, berikut beberapa tujuan penelitian:

1. Strategi pesan komunikasi yang digunakan oleh Jabatan Penerangan Kedah Malaysia dan Diskominfo Jawa Barat Indonesia
2. Pemilihan media yang digunakan oleh kedua lembaga dalam menyampaikan nilai madani, serta mengevaluasi efektivitas media tersebut dalam menjangkau dan mempengaruhi masyarakat.
3. Hasil keberhasilan sosialisasi nilai masyarakat madani, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas komunikasi pemerintah di kedua wilayah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu komunikasi, khususnya di bidang komunikasi pemerintahan dan komunikasi pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan strategi komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka mensosialisasikan norma-norma sosial dan moral kepada masyarakat. Temuan penelitian dapat memperkuat konsep strategi komunikasi menurut Cangara, Effendy, dan Rogers, yang menekankan pentingnya perencanaan pesan, pemilihan media, serta keterlibatan audiens dalam mencapai tujuan komunikasi yang efektif.

Secara konseptual, penelitian ini mengarah pada komunikasi yang islami dengan mengaitkan nilai-nilai madani seperti keadilan, tanggung

jawab sosial, toleransi, dan partisipasi sebagai prinsip-prinsip Islam yang fundamental dalam membangun masyarakat madani. Penelitian ini bertujuan memperkuat teori hubungan antara komunikasi publik dan pembentukan karakter masyarakat yang beradab dalam bingkai pembangunan yang berkelanjutan dan beretika Islam.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, penelitian ini menekankan pentingnya merancang strategi komunikasi yang berlandaskan nilai-nilai dakwah Islam, seperti kejujuran, kesabaran, dan musyawarah. Strategi komunikasi yang islami ini menempatkan formulasi pesan, pemilihan media, dan keterlibatan audiens sebagai kunci sukses dalam membangun kesadaran sosial dan moral yang mengacu pada ajaran Islam. Melalui pendekatan komunikasi islami, proses sosialisasi nilai madani diharapkan Tidak hanya sebagai sumber informasi semata, namun juga sebagai sarana dakwah yang menginspirasi masyarakat agar hidup dalam kerangka harmonis, toleran, dan bertanggung jawab sosial.

Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu komunikasi dengan memberikan perspektif komunikasi pemerintahan yang bersinergi dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, strategi komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan nilai madani tidak hanya efektif dari segi teknis komunikasi, tetapi juga bermuatan spiritual dan moral yang mendalam sesuai dengan prinsip Islam, yang relevan bagi masyarakat di Malaysia dan Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim. Pendekatan ini sekaligus mendukung terciptanya masyarakat

madani yang tidak hanya maju secara sosial dan budaya, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai Islam yang universal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Malaysia

Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis dan serta evaluatif kepada Jabatan Penerangan Kedah untuk memperbaiki pendekatan komunikasi mereka sehingga program sosialisasi nilai madani dapat lebih tepat sasaran dan berdampak luas di masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Indonesia

Untuk Diskominfo Jawa Barat, penelitian ini menjadi sumber penting dalam merancang ulang dan menguatkan strategi komunikasi, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan media digital dan menciptakan pesan yang relevan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Jawa Barat.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini menyediakan referensi ilmiah yang komprehensif untuk pengembangan studi komunikasi pemerintahan dan sosialisasi nilai sosial. Dosen, mahasiswa, dan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang komunikasi publik dan perbandingan strategi komunikasi antarnegara di Asia Tenggara.

d. Bagi Literatur Ilmiah Asia Tenggara

Penelitian ini memperluas wawasan akademik terkait komunikasi pemerintahan dalam membangun masyarakat madani yang beragam secara budaya di wilayah Asia Tenggara, sekaligus memberikan kontribusi pada literatur tentang hubungan komunikasi dan pembangunan sosial-politik.

Berikut tambahan elaborasi pada bagian Manfaat Praktis terkait Ranah Keilmuan Islam untuk penelitian berjudul "Strategi Komunikasi Program Pemerintah Dalam Sosialisasi Nilai Madani (Studi Kasus di Jabatan Penerangan Kedah Malaysia dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Indonesia).

e. Komunikasi dan dakwah Islam

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan dalam ranah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang komunikasi Islam (Islamic communication). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai madani yang berakar pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan toleransi, penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan model komunikasi pemerintahan yang tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga sesuai dengan etika dan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian dapat mendukung penerapan komunikasi dakwah yang konstruktif dalam konteks pemerintahan dan pembangunan masyarakat, menguatkan sinergi antara komunikasi publik dan nilai-nilai spiritual. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan

bagi akademisi dan praktisi dakwah untuk merancang strategi komunikasi yang lebih berkualitas dan bermuatan islami, sehingga dapat menjadi alat pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan syariat dan nilai-nilai luhur Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap keilmuan tentang komunikasi pemerintahan berbasis Islam yang relevan bagi masyarakat mayoritas Muslim di Malaysia dan Indonesia.

f. Bagi Masyarakat Umum

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang pentingnya komunikasi dalam pembentukan kesadaran sosial dan nilai-nilai madani. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi pelaku aktif dalam program sosialisasi pemerintah serta memiliki kemampuan kritis untuk merefleksikan dan mengaplikasikan nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, mendukung pembentukan masyarakat madani yang sejati.

Manfaat yang terbagi dalam aspek teoritis dan praktis ini menegaskan peran penting penelitian ini dalam meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan untuk memperkokoh tatanan sosial dan nilai di masyarakat modern.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dibangun di atas fondasi filsafat interpretivisme, sebuah paradigma yang meyakini bahwa realitas sosial tidaklah tunggal atau objektif, melainkan sebuah konstruksi yang lahir dari pemaknaan subjektif para aktor di dalamnya. Dalam konteks strategi komunikasi pemerintah baik oleh Diskominfo Jawa Barat maupun Jabatan Penerangan Kedah, pesan mengenai "Nilai Madani" tidak dipandang sebagai informasi satu arah yang statis. Sebaliknya, pesan tersebut adalah sebuah objek komunikasi yang dinamis, yang maknanya terus dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi antara pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, serta masyarakat sebagai audiens.

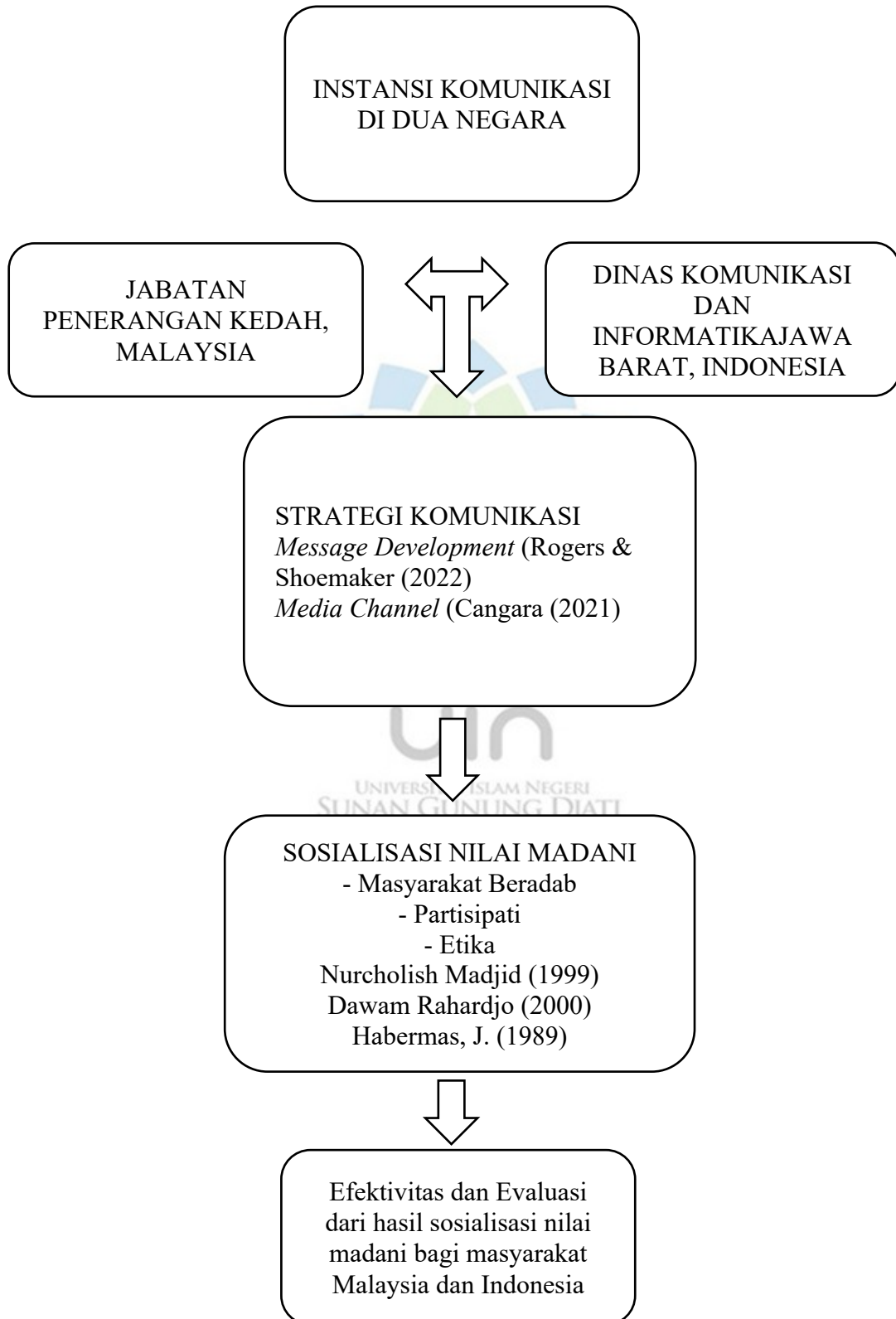
Melalui kacamata interpretivisme, peneliti memposisikan diri untuk memahami bagaimana realitas sosialisasi nilai madani dikonstruksi secara sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa efektivitas komunikasi sangat bergantung pada konteks budaya dan struktur politik masing-masing wilayah. Interpretivisme memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat "apa" yang dikomunikasikan, tetapi mengeksplorasi "bagaimana" para pemangku kepentingan memberi makna pada nilai-nilai tersebut berdasarkan latar belakang pengalaman dan pengetahuan mereka.

Dalam konteks sosialisasi nilai madani, pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami bagaimana para pemangku kepentingan termasuk pembuat kebijakan, pelaksana sosialisasi, media, dan masyarakat memberi makna dan berinteraksi dengan pesan yang disampaikan. Interpretivisme

mengadopsi akar dari hermeneutik dan fenomenologi, yang fokus pada pemahaman subjektif dan konteks budaya, sehingga sangat sesuai digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi audiens terhadap strategi komunikasi yang kompleks yang digambarkan melalui kerangka berfikir sebagai berikut :



Kerangka Berfikir Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Sosialisai Nilai Madani



Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan hubungan konseptual antara strategi komunikasi pemerintah dalam sosialisasi nilai madani di dua lembaga, yaitu Jabatan Penerangan Kedah (Malaysia) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Indonesia). Keduanya memiliki peran strategis sebagai pelaksana komunikasi publik yang bertujuan membangun kesadaran sosial dan nilai moral masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi, kedua instansi berupaya menanamkan nilai-nilai madani yang mencerminkan masyarakat beradab, partisipatif, dan beretika. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi dijalankan oleh kedua lembaga dalam konteks budaya dan sistem pemerintahan yang berbeda.

Strategi komunikasi menjadi tahapan utama dalam proses sosialisasi nilai madani. Strategi ini mencakup dua elemen penting, yaitu pengembangan pesan (message development) dan pemilihan media (media channel). Pengembangan Pesan dilakukan dengan menekankan tujuan komunikasi dan sifat khalayak sehingga pesan bersifat persuasif dan instruktif (Rogers & Shoemaker, 2022). Sementara itu, pemilihan media menjadi faktor penentu dalam efektivitas penyampaian pesan. Pemerintah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, baik media konvensional contoh radio, televisi, dan media cetak, maupun media digital seperti media sosial dan laman resmi lembaga (Cangara, 2021). Kombinasi kedua aspek ini bertujuan agar pesan nilai madani dapat diterima dan diinternalisasi secara optimal oleh masyarakat.

Proses sosialisasi nilai madani berakar pada gagasan para pemikir Muslim Indonesia serta teori komunikasi publik modern. Konsep masyarakat madani

sebagaimana dikemukakan oleh Nurcholish Madjid (1999) dan Dawam Rahardjo (2000) menekankan pentingnya moralitas, etika publik, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bernegara. Nurcholish Madjid menyebut masyarakat madani sebagai tatanan sosial yang menegakkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam bingkai nilai-nilai keagamaan. Dawam Rahardjo menambahkan bahwa masyarakat madani merupakan bentuk masyarakat yang menumbuhkan solidaritas sosial dan partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik. Di sisi lain, teori ruang publik (public sphere) oleh Habermas (1989) menegaskan pentingnya komunikasi rasional dan partisipatif dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan berketuhanan. Akibatnya, madani nilai menjadi disosialisasikan mencakup tiga dimensi utama: masyarakat beradab, partisipatif, dan beretika.

Tahap akhir dari kerangka berpikir ini adalah evaluasi efektivitas strategi komunikasi yang diterapkan oleh kedua lembaga dalam mensosialisasikan nilai madani. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Pesan yang dikomunikasikan dapat dipahami, diserap, dan dilaksanakan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari perbandingan antara Malaysia dan Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model strategi komunikasi yang efektif dalam menanamkan nilai madani di masyarakat. Hasilnya, penelitian ini tidak hanya memperkuat teori komunikasi pemerintah tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai.